



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	REF.	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%) Realisasi terhadap Anggaran	REALISASI 2023
PENDAPATAN	5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	49.876.586.982,00	22.060.219.369,80	44,23	56.319.360.172
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	6.556.973.058,00	8.184.315.989,00	124,82	6.998.837.446
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	20.192.215.980,00	4.579.510.360,83	22,68	27.049.143
Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	41.333.719.514,00	33.344.621.451,83	80,67	34.600.093.491
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1	117.959.495.534,00	68.168.667.171,46	57,79	97.945.340.251,68
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	5.1.1.2.1				
Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	1.350.006.016.000,00	1.317.897.063.468,00	97,62	1.102.954.754.926,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.2	0,00	0,00	-	6.264.924.000,00
Dana Desa	5.1.1.2.1.3	133.014.020.000,00	133.014.020.000,00	100,00	135.105.046.000,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.4	5.890.545.000,00	5.890.545.000,00	100,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	1.488.910.581.000,00	1.456.801.628.468,00	97,84	1.244.324.724.926,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.2				
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	63.204.000.000,00	52.166.886.132,00	82,54	63.385.453.045,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	63.204.000.000,00	52.166.886.132,00	82,54	63.385.453.045,00
Jumlah Pendapatan Transfer	5.1.1.2	1.552.114.581.000,00	1.508.968.514.600,00	97,22	1.307.710.177.971,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	50.000.000,00	378.281.230,00	756,56	501.263.540,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.1.1.3.2	0,00	7.683.649.310,00	-	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.1.1.3	50.000.000,00	8.061.930.540,00	16.123,86	501.263.540,00
JUMLAH PENDAPATAN	5.1.1	1.670.124.076.534,00	1.585.199.112.311,46	94,92	1.406.156.781.762,68
BELANJA	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	579.390.704.751,00	506.232.945.775,58	87,37	441.447.210.765,96
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	412.475.281.252,78	369.606.587.482,51	89,61	360.870.851.259,08
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	2.680.150.000,00	2.536.412.800,00	94,64	1.668.543.000,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	105.685.085.505,40	103.297.956.459,44	97,74	85.914.892.627,75
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	3.278.349.698,00	2.507.849.689,00	76,50	1.312.245.000,00
Jumlah Belanja Operasi	5.1.2.1	1.103.509.571.207,18	984.181.762.206,53	89,19	891.213.742.652,79
BELANJA MODAL	5.1.2.2				
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	1.500.000.000,00	1.478.500.000,00	98,57	85.029.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	112.913.340.540,54	106.614.740.833,80	94,42	46.249.673.882,99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	162.045.369.748,00	160.277.154.014,83	98,91	153.018.617.584,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.4	110.735.899.202,28	105.242.194.176,61	95,04	132.461.127.644,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	236.331.000,00	235.131.200,00	99,49	1.100.504.955,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	350.790.000,00	347.790.000,00	99,14	0,00
Jumlah Belanja Modal	5.1.2.2	387.781.730.490,82	374.195.510.225,24	96,50	332.915.153.065,99
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	8.232.227.250,00	1.605.409.963,00	19,50	1.062.262.800,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	8.232.227.250,00	1.605.409.963,00	19,50	1.062.262.800,00
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
Transfer Bagi Hasil	5.1.2.4.1	6.481.006.786,00	6.446.126.714,70	99,46	4.474.309.567,00
Transfer Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	220.715.535.800,00	220.715.535.800,00	100,00	216.426.656.200,00
Jumlah Belanja Transfer	5.1.2.4	227.196.542.586,00	227.161.662.514,70	99,98	220.900.965.767,00
JUMLAH BELANJA	5.1.2	1.726.720.071.534,00	1.587.144.334.909,47	91,92	1.446.092.124.285,78
SURPLUS/DEFISIT	5.1.3	(56.595.995.000,00)	(1.945.222.598,01)	3,44	(39.935.342.523,10)

URAIAN	REF.	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%) Realisasi terhadap Anggaran	REALISASI 2023
PEMBIAYAAN	5.1.4				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		56.595.995.000,00	56.623.488.153,98	100,05	111.410.337.523,08
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.1.4.1	56.595.995.000,00	56.623.488.153,98	100,05	111.410.337.523,08
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
Penyertaan Modal		0,00	0,00	-	14.879.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.1.4.2	0,00	0,00	-	14.879.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	5.1.4	56.595.995.000,00	56.623.488.153,98	100,05	96.531.337.523,08
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.5	0,00	54.878.265.555,97	100,00	56.595.994.999,98





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024
DI KASONGAN**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI PALANGKA RAYA**

Nomor : 45.A/LHP/XIX.PAL/07/2025

Tanggal : 16 Juli 2025

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI7EA1D2.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Katingan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Katingan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 3.3 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan yang menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan menyajikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran (TA) 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2024 tanggal 1 November 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024. Pemerintah Kabupaten Katingan melakukan perubahan/pergeseran APBD Kabupaten Katingan TA 2024 melalui pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten Katingan, namun tidak didukung dengan persetujuan DPRD dan penetapan melalui Perda Perubahan APBD.

Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 45.B/LHP/XIX.PAL/07/2025 tanggal 16 Juli 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palangka Raya, 16 Juli 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**

